

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**GERY SEFTIA FULLENDRA**  
**11621104023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1443 H/2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Peran dan Efektifitas Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ”** yang ditulis oleh:

**Nama : Gery Seftia Fullendra**

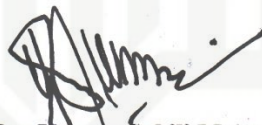
**NIM :11621104023**

**Program Studi : Hukum Keluarga**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi



**Drs. Nurhan Sabili, M.Ag**  
NIP. 196503131992031003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM BERSERTIFIKAT DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : GERY SEFTIA FULLENDRA  
NIM : 11621104023  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin 8 November 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

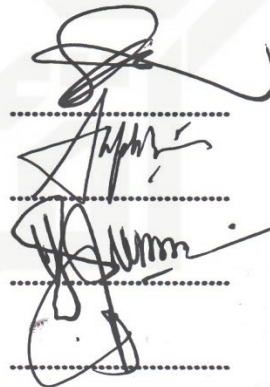
Pekanbaru, 22 November 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Yusran Sabili, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Suhayyib, M.Ag**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Zulkifli M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Gery Seftia Fullendra  
NIM : 11621104023  
Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 17 Januari 1997  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON  
HAKIM BERSERTIFIKAT DALAM UPAYA  
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN  
DIPENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga:

Pekanbaru , 09 November 2021

Yang membuat pernyataan



Gery Seftia Fullendra  
11621104023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Efektifitas peran mediator non hakim bersertifikat dalam upaya menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan saudara pembaca, karena kecintaan penulis terhadap mediator Syari'ah sehingga penulis menjadikan judul ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rampunya penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Anasriful dan Ibunda tercinta Lendrawati beserta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas ,M. Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr.H. Zulkifli M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan jajarannya.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah beserta sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan *Sprit* intelektual kepada penulis selama di UIN SUSKA.
5. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.
6. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk kawan-kawan satu Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah angkatan 2016, terkhusus kepada Saudara Imam Assyatibi, dan Muhammad Hafis yang telah memberikan banyak bantuan baik materi maupun non materi selama menempuh pendidikan Strara 1 di UIN SUSKA baik suka maupun duka.

Penulis tentunya masih menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Penulis

Gery seftia f

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Gery Seftia Fullendra, Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas peran mediator non hakim bersertifikat dalam upaya menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1a. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang dianggap lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara, oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang efisien dan efektif serta para pihak sama-sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim bersertifikat maka kemungkinan besar mampu mendamaikan pihak yang bersengketa.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan adalah data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti data ini diperoleh dari mediator non hakim bersertifikat Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1A. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator non hakim bersertifikat dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada Pengadlan Agama Pekanbaru Klas 1A memiliki peranan penting dalam melaksanakan proses mediasi berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim selaku mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A. Hanya saja hasil/efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru belum efektif karena adanya faktor penghambat mediator dalam menyelesaikannya antara lain adalah: 1) para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi, 2) tidak ada yang mau mengalah, 3) Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit, 4) Para pihak sering menunjukkan iktikad tidak baik.

Implikasi Penelitian ini adalah: 1) dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1a dikehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Mediator harus berperan dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan, 2) penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

**Kata kunci: Efektivitas, Peran, Mediator, Menekan, Perkawinan.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### ABSTRAK

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sumber Data Penelitian .....	14
G. Teknik Pengumpulan Data .....	15
H. Analisis data .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	16

#### BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

A. Pengertian Peradilan Agama .....	18
B. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia .....	19
C. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia.....	20
D. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia .....	22
E. Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia .....	22
F. Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru Klas 1A .....	26
G. Struktur Ketenagaan PA Pekanbaru .....	31

#### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIATOR DAN PERKAWINAN

A. MEDIASI .....	39
a. Pengertian Mediasi .....	39
b. Dasar Hukum Mediasi .....	41
c. Fungsi Dan Tujuan Mediasi .....	42
d. Peranan Mediator .....	45
B. PERCERAIAN .....	47



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Perceraian .....	47
b. Dasar Hukum .....	48
c. Sebab-Sebab Perceraian .....	50

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Efektivitas Serta Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1a.....	56
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Memediasi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	66

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Sehingga Islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup dengan damai sesama manusia yang ada disekitar, tidak ada perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain, agar tercipta masyarakat yang damai, aman, dan tentram tanpa ada masalah. Mengatur berbagai perikehidupan, diperlukan suatu peraturan yang dibuat, disepakati, dan ditaati oleh manusia atau sekelompok orang. Peraturan-peraturan yang dibuat itu umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang.<sup>1</sup> Peraturan-peraturan itu kemudian dituangkan kedalam hukum tertulis yang bersifat mengikat kepada semua lapisan masyarakat.

Di negara kita Indonesia memiliki dua sistem hukum yakni hukum pidana dan hukum perdata, dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan sengketa yang terjadi mengambil jalan dengan cara melalui jalur hukum di pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia* (Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu), (Makassar: Alauddin University Press, 2014 ),Cet,Ke-1. h. 1.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu jenis kompetensi absolut<sup>2</sup> Peradilan Agama (selanjutnya disingkat PA) adalah menangani sengketa perceraian, baik perkaracerai talak maupun cerai gugat.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Pasal 49 UU No 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Dalam sidang pertama perkara perceraian, ketika kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak pada hari itu juga atau paling lambat dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator, yang kemudian dilaksanakan mediasi. Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam sistem hukum Islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua hakam (juru damai atau mediator)<sup>5</sup>, dengan maksud untuk mencari jalan keluar, sebagaimana firman Allah Azaa Wa Jalla:

<sup>2</sup> Kompetensi bagi lembaga peradilan adalah kewenangan untuk mengadili suatu jenis perkara tertentu dan atau dalam wilayah hukum tertentu. Oleh karena itu, kompetensi lembaga peradilan mencakup dua hal, yakni kompetensi yang berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang disebut kompetensi absolut, dan kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum (yudiksiteritorial) bagi suatu pengadilan yang disebut kompetensi relatif. A. Zuhdi Muhdlor, "Kompetensi", disampaikan pada penanganan sengketa perceraian, baik perkaracerai talak maupun cerai gugat<sup>3</sup>. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Pasal 49 UU No 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup> Dalam sidang pertama perkara perceraian, ketika kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator, yang kemudian dilaksanakan perkuliahan Hukum Acara Perdata Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011. h. 15

<sup>3</sup> Cerai talak adalah perceraian yang inisiatifnya berasal dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang inisiatifnya berasal dari pihak isteri.

<sup>4</sup> Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dalam reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2013), h. 496.

<sup>5</sup> Ibid. h. 498



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. An-Nisa [4]:35).<sup>6</sup>

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses memediasi para pihak yang bersengketa maka mediator harus bersifat netral dan juga adil. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.<sup>7</sup> Pihak mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>8</sup>

Pada umumnya, mediasi dilakukan pada ruangan khusus yang telah disediakan oleh pengadilan.

<sup>6</sup> Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya QS An-Nisa/4:35 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 87.

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. Ke-2, h. 24.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Cet. Ke-1, h. 47.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di ruangan tersebut kedua belah pihak melakukan proses mediasi yang didampingi oleh hakim mediator yang telah ditunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>9</sup>

Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win).<sup>10</sup>

Diantara perkara di lingkungan Peradilan Agama yang paling banyak ditangani adalah perkara perceraian dikarenakan ketidak harmonisan hubungan suami isteri dalam perkawinan.<sup>11</sup> Dalam undang-undang dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

<sup>9</sup> Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008.

<sup>10</sup> Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Cet. ke-3, h. 36-37.

<sup>11</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 373.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Maka dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.<sup>13</sup>

Secara umum perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi pasangan menikah dimanapun. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah usaha dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, dalam perceraian menyangkut beberapa aspek, seperti ekonomi maupun sosial. Meskipun diperbolehkan, namun perceraian dianggap sebagai suatu masalah sosial.

Suami-istri seharusnya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena jika perceraian terjadi yang merasakan akibatnya bukan hanya suami istri tersebut, tetapi juga anak-anak yang tidak berdosa. Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik daripada suami atau istri mereka.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h.1.

<sup>14</sup> A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Al Bayan, 1994 ), h. 91.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perselisihan antara suami-istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian, yang merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan.<sup>15</sup>

Indonesia merupakan negara dengan angka perceraian yang cukup tinggi, khususnya kasus perceraian di Kota Pekanbaru yang setiap tahunnya cenderung meningkat, dalam satu hari, pasangan atau salah satu pasangan suami isteri yang mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru bisa mencapai angka puluhan. Sementara rata-rata dalam satu hari majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengeluarkan 5-8 putusan cerai, dan dari data pengadilan selama tahun 2018 tercatat ada 1.919 perkara, baik perkara permohonan maupun gugatan, sementara pada tahun 2019 terdapat 1.873 perkara dan pada tahun 2020 sampai pada bulan juni sudah terdapat 865 perkara dan kemungkinan terus bertambah.<sup>16</sup>

Banyak pasangan yang tidak bisa bertahan lantaran terhimpit masalah ekonomi. Banyaknya suami yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada isteri dan juga faktor kekerasan dalam keluarga juga berdampak pada kasus perceraian. Kemajuan teknologi yang terus berkembang, juga memiliki korelasi dengan semakin meningkatnya kasus perceraian.

<sup>15</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-2, h. 181.

<sup>16</sup> Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak pasangan yang mengajukan perceraian lantaran pasangan lainnya berselingkuh baik lewat handphone maupun internet dan juga tingginya angka perceraian, satu di antaranya disebabkan oleh belum terkendalinya warga yang menikah di usia dini. Melihat fenomena perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan angka pertumbuhan yang meningkat, akan sangat bertentangan dengan prinsip dalam perkawinan yang mengharapkan kehidupan yang rukun dan damai. Meskipun memungkinkan untuk terjadi, perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan berdasarkan atas alasan-alasan serta telah diupayakan untuk didamaikan oleh hakim melalui nasehat-nasehat dalam proses mediasi.<sup>17</sup>

Upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa agar tetap menjaga komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan di dunia dengan baik antar sesama manusia. Walaupun dalam prakteknya, upaya perdamaian oleh mediator telah ditempuh, tetapi tetap saja angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru cukup sulit untuk diturunkan jumlahnya.<sup>18</sup>

Dalam lingkungan Peradilan Agama, usaha mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Op.Cit, h. 183.

<sup>18</sup> Ibid, h. 182.

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke- 5. h. 242.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4, bahwa semua perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Mediasi dapat kedudukan penting dalam system hukum di indonesia, yakni diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam ketentuan PERMA tersebut mengatur bahwa setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu.<sup>20</sup>

Para pihak dipaksa oleh sistem hukum yang ada untuk berdamai terlebih dahulu, dengan cara mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mau mengakhiri perselisihan atau sengketa dengan dibantu dan difasilitasi oleh mediator. Mediator sendiri harus merupakan pihak netral yang tidak memiliki kepentingan apa pun yang memiliki sertifiakat mediator yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya, mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh hakim. Namun, mengingat jumlah hakim yang terbatas, maka lembaga yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI (Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan ).<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) No. 1 Tahun 2016.

<sup>21</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 50.

<sup>22</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), Cet. Ke-2, h. 312.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengizinkan kepada mediator yang sudah lulus dan mendapat sertifikat untuk melaksanakan mediasi di Agama.

Hakim yang menjadi mediator bukanlah hakim yang sedang menangani perkara yang akan dimediasikan, tetapi hakim-hakim lainnya di pengadilan tersebut. Mediator non hakim dapat berpraktik di pengadilan, bila memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI (Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan ).<sup>23</sup> Di Pengadilan Agama pekanbaru ada 5 orang mediator non hakim bersertifikat yang di SK kan oleh ketua pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan surat permohonan oleh: Dr. Solehuiddin Harahap, Drs. Mardanis, S.H.,M.H., Drs. H.M. Nasir As, S.H., Gusri Putra Dodi, S.H., M.H dan Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A.,M.M.

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru selalu menjadi perkara yang dominan tinggi dibandingkan perkara lainnya. Tentunya ini menjadi perhatian penting untuk dikaji, kurangnya mediator adalah salah satu penghambat untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, tentunya dengan keputusan/penunjukan mediator non hakim bersertifikat ini dapat menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A.

---

<sup>23</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis sangat tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana pengangkatan dan bagaimana peran serta efektivitas mediator non hakim bersertifikat di pengadilan Agama pekanbaru Klas 1A dalam menekan angka perceraian, maka penulis tuangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul: **“Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada efektivitas peran mediator non hakim bersertifikat dalam upaya menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Maka penelitian lapangan ini mewawancarai para mediator non hakim bersertifikat dipengadilan agama Pekanbaru.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran mediator non hakim bersertifikat dalam menekan angka perceraian di pengadilan agama pekanbaru ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediator non hakim bersertifikat dalam memediasi para pihak yang berperkara di pengadilan agama Pekanbaru ?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui peran mediator non hakim bersertifikat dalam menekan angka perceraian di pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mediator non hakim bersertifikat dalam memediasi para pihak yang berperkara di pengadilan agama pekanbaru.
3. Untuk mengetahui Analisis hukum terhadap pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim bersertifikat di pengadilan Agama Pekanbaru.

Adapaun Kegunaan Penelitian :

1. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang peradilan secara umum.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baik di kalangan intelektual ataupun orang awam tentang hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian.

Adapun subjek penelitian ini adalah mediator non hakim bersertifikat yang berada di pengadilan agama pekanbaru, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peran dan efektivitas mediator non hakim bersertifikat dalam upaya menekan angka perceraian berdasarkan keputusan ketua Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A.

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>24</sup>

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

<sup>24</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, ( Jakarta : KENCANA, 2013 ), h. 30.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>25</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>26</sup> Dari jumlah populasi penulis menjadikan semua populasi menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik *total sampel*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis menjadikan semua populasi menjadi sampling, karena jumlah populasinya hanya 5 orang.

### 4. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisa dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan pada penelitian ini.

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif*, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 215.

<sup>26</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 114.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji secara langsung efektivitas mediasi dalam sengketa perdata perceraian, baik permohonan maupun gugatan di Pengadilan Agama pekanbaru klas 1A.

## F. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup> Sumber penelitian dilakukan dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara dengan mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1A.

### b. Data Sekunder

- a) Bahan hukum primer berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.
- b) Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

<sup>28</sup> H. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 42.



## G. Teknik Pengumpulan Data.

### a) Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>29</sup>

Dalam hal ini peneliti langsung mengamati proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A.

### b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Adapun rencana narasumber yang menjadi obyek wawancara dalam penelitian ini adalah mediator non hakim bersertifikat di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A.

### c) Dokumentasi

Dokumentasi berupa data-data dari arsip atau berkas sengketa perdata perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A kemudian mempelajari dan mengkajinya

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2013 ), cet. Ke-1, h. 131.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Analisis Data.

Setelah penyusun memperoleh data, maka data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif. Selain itu, penyusun juga memakai metode berfikir induktif dengan menganalisa dari fakta atau keadaan yang ada dilapangan dalam hal ini Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

## I. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat sistematika berdasarkan bab. Penulis menjadikan penelitian ini dalam lima bab, masing – masing terdiri dari sub bab yang merupakan penjelas dari bab tersebut.

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### Bab II Tinjauan Umum dan sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru.

1. Pada bab ini memuat tentang Pengertian Peradilan Agama, Dasar Hukum, Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia.
2. Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia.
3. Sejarah Peradilan Agama Pekanbaru.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Bab III** pada bab ini berisi kajian teoritis tentang mediator, meliputi: kajian mengenai pengertian mediator.

1. Peran dan efektifitas, pengertian hakim, meditor dan mediasi dalam sistem peradilan.
2. Pengertian perceraian, landasan hukum perceraian dan sebab-sebab perceraian.

**Bab IV** Analisis dan Pembahasan. Pada bab ini memuat pembahasan mengenai pengangkatan dan pelaksanaan

1. mediator non hakim bersertifikat, peran serta efektivitas mediator non hakim bersertifikat dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama pekanbaru klas 1A.
2. faktor-faktor apa saja pendukung dan penghambat keberhasilan mediator non hakim dalam memediasi para pihak berperkara.

**Bab V** Berisi penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### SEJARAH SINGKAT PERADILAN AGAMA PEKANBARU

#### A. Pengertian Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>30</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 12-13.

<sup>31</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2003, h. 5.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 12 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam Undang-undang tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.<sup>32</sup>

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengenai bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, maka diatur dalam

<sup>32</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7-8.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-undang tersebut diikuti dengan perubahan Undang-undang yang mengatur badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-undang tentang perubahan kedua lingkungan peradilan tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. Namun belum terjadi perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>33</sup>

### C. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia

Sebelum Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat memeluk agama Hindu. Dan pada waktu itu, dalam kehidupan masyarakatnya telah di kenal adanya dua macam peradilan,<sup>34</sup> yakni:

<sup>33</sup> Musthofa, *Op. Cit*, h. 7-8.

<sup>34</sup> Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1977), h. 16.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peradilan Pradata, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja.
- b. Peradilan padu, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada di bumi Indonesia pada abad ke tujuh atau kedelapan masehi,<sup>35</sup> dengan tingkat tahapan dan bentuknya sebagaimana ditentukan oleh hukum islam.

Ketika colonial Belanda mulai memasuki Indonesia melalui VOC, yakni sebuah wadah dagang yang telah mengarahkan sasarannya untuk menjajah Nusantara, tidak dapat menyepelekan eksistensi Hukum Islam yang telah berurat akar dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia. Meskipun VOC semakin kokoh mencengkeram dan bahkan selanjutnya menjajah Nusantara ini, tidak mampu menekan dan membendung pelaksanaan Hukum Islam yang menjadi keyakinan hidup upaya menghapuskan Hukum Islam sama sekali yang dilakukan secara terus menerus hanya mampu pada bidang pidana.<sup>36</sup>

Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>37</sup>. Hal ini merupakan puncak dari kekokohan dan kemapanan Badan Peradilan

<sup>35</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 35.

<sup>36</sup> Asa, *Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta: Serial Media Dakwah, 1989), h. 2.

<sup>37</sup> Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama. Sebagai Peradilan Negara di bumi Indonesia. Pengadilan Agama sudah tidak lagi harus menggantungkan kepada Pengadilan Negeri.

### D. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Kedudukan Peradilan Agama dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Dan sebagai badan Peradilan khusus sebagaimana halnya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakannya adalah dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>38</sup> Yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan sama sekali daripada hukum agamanya yaitu hukum Islam.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya kedua jenis Pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.<sup>39</sup>

### E. Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 3.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.<sup>40</sup>

### 1) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.<sup>41</sup>

### 2) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 25-27.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.<sup>42</sup>

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.<sup>43</sup>

a) Jenis Perkara Yang Menjadi kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi:

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 27-28.

<sup>43</sup> *Ibid*.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pasal 49

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. Perkawinan;
  - b. Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah<sup>44</sup>
  - d. Ekonomi Syari'ah.<sup>45</sup>
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.<sup>46</sup>
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

<sup>44</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 271.

<sup>45</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 689-690.

<sup>46</sup> Izin beristeri lebih dari satu orang, Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, Dispensasi kawin, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Pembatalan perkawinan, Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, Perceraian karena talak, Gugatan perceraian, Penyelesaian harta bersama, Mengenai penguasaan anak (*hadhanah*), Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya, Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, Pencabutan kekuasaan wali, Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal ke dua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan, kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, Penetapan asal usul seorang anak, Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 197.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.<sup>47</sup>

#### Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>48</sup>

Dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>49</sup>

#### F. Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru Klas 1A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 28-29.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 54.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.<sup>50</sup>

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa 'Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah *Syari'ah* Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru.

Dengan dilantiknyanya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.<sup>51</sup>

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampin-

<sup>50</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 3 maret 2021.

<sup>51</sup> Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se Wilayah Riau*, Pekanbaru. T.p., 1995, h. 8.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menem-  
pati kantor sendiri.<sup>52</sup>

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban

<sup>52</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru , tanggal 3 maret 2021.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019) dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020).dan Drs.Ahmad Sayuti,M.H(2020-sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>53</sup>

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

### Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT”

### MISI

1. Menjaga Kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a.
2. Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau, Pekanbaru*, t.p.,1995, h. 8.

<sup>54</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 3 maret 2021.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Struktur Ketenagaan PA Pekanbaru<sup>55</sup>

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	-	
3	Hakim	19	
4	Panitera	1	
5	Sekretaris	1	
6	Panmud	3	
7	Kasubbag	3	
8	Panitera Pengganti	13	
9	Jurusita	5	
10	Jurusita Pengganti	5	
11	Fungsional Umum	5	
12	Honorar	14	

Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.

<sup>55</sup>*Ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Ketua
  - a. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama kelas 1a Pekanbaru.
  - b. Mewujudkan aparatur Pengadilan agama kelas 1A Pekanbaru yang professional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karima
  - c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Wakil Ketua
  - a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya
  - b. Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan/penetapan Hakim dan putusan
  - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian tim.
3. Hakim
  - a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya
  - b. Menyelesaikan minutas
  - c. Melaksanakan tugas sebagai Hakim pengawas bidang

<sup>56</sup>*Ibid*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Penitera/Sekretaris

- a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan
  - Mengkordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan
- b. Kordinasi dan kepengawasan kegiatan kepaniteraan
  - Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera muda, penitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
  - Mengkordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara bandng yang di ajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru.<sup>57</sup>
- c. Pembinaan staf.
  - Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus

<sup>57</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakn dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>58</sup>

#### 5. Wakil penitera

##### a. Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan yang efektif dan melaporkannya kepada atasan.
- Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum

##### b. Kordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan

- Mengatur pembagian tuagas kepaniteraan kepada panitera Muda dan Panitera Pengganti agar Perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
- Membantu tuhas Hakim Pengawas Bidang.

##### c. Pembinaan staf.

- Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

#### 6. Panitera Muda Pengganti

- a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundle A yang diserahkan kepalanya.

<sup>58</sup>*Ibid*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan
- c. Berkas perkara yang telah register dilengkapi dengan formulir prnrtapan majlis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua PA 1A Pekanbaru.<sup>59</sup>

## 7. Panitera Muda Hukum

- a. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub Bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
- b. Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama
- c. Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin

## 8. Panitera Pengganti

- a. Mencatat jalannya siding dan bertanggung jawab atas kebenaran catatn siding berdasarkan sumpah jababan panitera pengganti
- b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara
- c. Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majlis

<sup>59</sup> Ibid.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Wakil Sekretaris

- a. Mengkordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik Negara dan administrasi lainnya
- c. Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kegiatan yang berlaku

## 10. Kasubbag Kepagawaian

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian
- b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar
- c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat, dan daftar pulang pegawai pengadailan Agama Pekanbaru

## 11. Kasubbag Umum

- a. Menyelenggarakan adminitrasi di bidang umum
- b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor seusia bidang sub umum
- c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor

## 12. Kasubbag Keuangan

- a. Menyelenggarakan adminitrasi di bidang keuangan
- b. Membuat anggaran perencanaan PA pekanbaru



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memonitor pembukaan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas.<sup>60</sup>

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

#### 1) Fungsi mengadili (*Judicial power*)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

#### 2) Fungsi pembinaan,

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *yudicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

#### 3) Fungsi pengawasan,

yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

<sup>60</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).<sup>61</sup>

4) **Fungsi nasehat,**

yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup>*Ibid.*

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN PERCERAIAN

### A. Mediasi

#### a. Pengertian Mediasi

Kata “mediasi” berasal dari bahasa Inggris, “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>63</sup>

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah hal melibatkan pihak ketiga sebagai penengah seperti dalam proses penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan penengahan.<sup>64</sup>

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makana ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada di tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa

---

<sup>63</sup> Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* ( Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), Cet.XXV, h. 377.

<sup>64</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru)* ( Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), Cet.VI, h. 571.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.<sup>65</sup>

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.<sup>66</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa'/4: 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ يَبْنَ النَّاسُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَتَتْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.<sup>67</sup>

Adapun pengertian mediasi menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, h. 1-2

<sup>66</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia* (Yogyakarta Aswaja Press, 2015) h. 28.

<sup>67</sup> *Mushaf Al-Qur'an Terjemah, QS. An-Nisa /4:114* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h. 98.

<sup>68</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak.<sup>69</sup> Sedangkan dalam perma no.1 tahun 2016 pasal 1 butir 2 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>70</sup>

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (*limited*) atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

#### b. Dasar Hukum Mediasi

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv).
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan

<sup>69</sup> Yusna Zaidah, *Op. Cit.*, h. 29.

<sup>70</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Damai.

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
6. Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

#### c. Fungsi Dan Tujuan Mediasi

Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan ia harus netral. Karena jika ia mediator bersikap netral, maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Mediator juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win). Selain itu mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan.<sup>71</sup>

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:<sup>72</sup>

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

<sup>71</sup> Yusna Zaidah, *Op. Cit*, h. 28- 29.

<sup>72</sup> Syahril Abbas, *Op.Cit*, h. 25-26





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelebagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang bermanfaat. Dilihat dari kekuatan potensial mediasi yaitu:

1. Mampu memenuhi segitiga kepuasan, yaitu kebutuhan substantif, kebutuhan prosedural dan psikologis dari para pihak yang bersengketa. Kebutuhan substantif (rasional) adalah kebutuhan yang langsung mengenai pokok sengketa yang terjadi. Kebutuhan prosedural yaitu cara mediator memperlakukan para pihak yang bersengketa dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses mediasi. Para pihak itu sendiri yang menentukan atau yang memutuskan cara penyelesaian sengketa mereka dengan menempatkan mereka sebagai subyek bukan sebagai obyek. Kebutuhan psikologis yaitu tetap menjaga dan memelihara hubungan pertemanan antara para pihak, meskipun kedua belah pihak pernah bersengketa. Dan hubungan pertemanan itu masih akan tetap terjaga oleh karena penyelesaian mereka win-win solution.

2. Penyelesaian mediasi lebih murah, cepat, dan efisien meski hal tersebut sifatnya relatif tapi berpotensi.
3. Kepesertaannya, di sini kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada orang yang merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik misalnya terdapat sengketa atau konflik antara perusahaan iklan rokok atau media cetak, sebagai contoh dalam persoalan rokok melibatkan banyak pihak.<sup>73</sup>

#### d. Peranan Mediator

Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
2. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum ( *to give*

<sup>73</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 237



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).

3. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.
4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
5. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*convidentil information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Restiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), h. 20-21.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Perceraian

### a. Pengertian Perceraian.

Menurut bahasa, al-thalaq الطلاق berasal dari kata al-ithlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya ketika Anda mengatakan “Saya melepaskan tawanan” berarti Anda telah membebaskannya.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa “Talak” berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “Furqah” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti: perceraian antara suami istri.<sup>75</sup>

Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.<sup>76</sup> Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan:

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya”.<sup>77</sup>

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwal al-Syakhsiyyah menyebutkan:

“Melepaskan ikatan pernikahan pada saat sekarang atau yang akan

<sup>75</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 156.

<sup>76</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011), h.105.

<sup>77</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 326.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang dengan lafaz turunan dari unsur talak atau semacamnya”.<sup>78</sup>

Dari rumusan yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqih diatas, terdapat kita kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak.

Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: kata “dengan lafaz tha-la-qa dan sama makna dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan: putusan perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.<sup>79</sup>

#### b. Dasar Hukum

Talak disyariatkan dengan al-Quran, as-Sunah, dan ijma’.<sup>80</sup> Dari al Quran adalah, firman Allah swt:

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 326

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 199.

<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, h. 318.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ۖ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (al-Baqarah.229).<sup>81</sup>

Juga Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”.(ath-Thalaq. 1).<sup>82</sup>

Sedangkan berdasarkan sunah adalah sabda Rasulullah saw:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.<sup>83</sup>

Seluruh ulama sepakat bahwa talak disyariatkan dalam agama Islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap disyariatkannya talak. Manusia telah berkonsensus atas pembolehan talak. Hal ini juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan. Dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya. Oleh karena itu, ditetapkan syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan,

<sup>81</sup> Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya, Qs Al-Baqarah/299 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 36

<sup>82</sup> Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya, Qs Ath-Thalaq/1 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 558

<sup>83</sup> Abu Daud di dalam Sunan Abi Dawud, Kitab An-Nikah fi Karahiyati Ath-Thalaq, jilid II, H.261, hadist nomor 2178



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini.<sup>84</sup>

c. Sebab-Sebab Perceraian

Alasan perceraian dapat dijumpai pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: Dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan cerai ada enam poin yang harus diperhatikan. Diantara point tersebut yaitu bila salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perzinahan atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan; salah satu pihak pergi tanpa kabar selama 2 tahun; mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun setelah menikah; melakukan kekejaman dan penganiayaan atau yang biasa disebut dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga); mempunyai cacat badan yang menyebabkan suami/istri tidak dapat memenuhi kewajibannya; dan antara keduanya terdapat perselisihan yang terus menerus tanpa ada hentinya dan kemungkinan tidak dapat hidup rukun kembali.<sup>85</sup>

Untuk alasan perceraian ini, dalam KHI juga menjelaskan hal yang sama tentang alasan perceraian. Hanya saja di dalam KHI terdapat dua point tambahan dalam penyempurnaannya, yaitu bila suami melanggar taklik talak yang sudah disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak berpindah dari agama Islam (murtad) yang menyebabkan tidak ada

<sup>84</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 319.

<sup>85</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. 5, Pasal 19, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 38.



kerukunan dalam rumah tangga.<sup>86</sup>

### 1. Alasan Perceraian Dalam Islam

Alasan perceraian adalah suatu kondisi di mana suami atau istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk putus/ terputusnya pernikahan.<sup>87</sup>

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Mengenai hal ini al-Qur'an memberikan petunjuk, yaitu: Qs. An nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan

<sup>86</sup> Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4, Pasal 116, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 35.

<sup>87</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 269- 274.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.<sup>88</sup>

Ayat di atas menjelaskan bila suami menghadapi isterinya nusyuz maka solusi untuk menghadapinya diberikan 3 alternatif yaitu:

- a. Istri diberi nasehat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang dibuatnya.
- b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna agar hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendirian tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c. Apabila cara ini tidak berhasil langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.<sup>89</sup>

Terjadinya nushuz dari pihak suami:<sup>90</sup>

Nushuz tidak hanya dapat terjadi dan dilakukan oleh istri, suami juga dapat berlaku nushuz. Selama ini sering disalah pahami bahwa nushuz hana dating dari pihak istri saja, padahal al-Qur’an menyebutkan adanya nushuz dari suami sesuai dengan ayat al-Qur’an dalam surat al Nisa’ ayat 128, yaitu:

<sup>88</sup> Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya, Qs An-Nisa/34. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.84.

<sup>89</sup> Ahmad Rafiq, *Op. Cit*, h. 270.

<sup>90</sup> Ibid. 270-271.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>91</sup>

Kemungkinan nushuz-nya seorang suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memnuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Terjadinya perselisihan/percekcokan antara suami istri (Shiqaq):<sup>92</sup>

Jika dua kemungkinan di atas menggambarkan salah satu pihak nushuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam percekcokan (shiqaq), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam hal ini al-Qur’an memberi petunjuk dalam surat al-Nisa” ayat 35, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara

<sup>91</sup> Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya, Qs An-Nisa/128 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 99.

<sup>92</sup> Ahmad Rafiq, *Op. Cit*, h. 272-273.



## Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya, Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>93</sup>

Dari ayat di atas jelas sekali aturan Islam dalam mnangani problem kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan paa perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Ulama” sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tanpa diketahui sebab- sebab perselisihan itu, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah. Kesepakatan ini didasarkan atas firman Allah yang telah disebutkan di atas.<sup>94</sup>

Terjadinya salah satu pihak berbuat zina.

Hal ini juga disebut dngan fasakh, yang mana menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan li”an., Li”an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya karena akibat li”an adalah terjadinya talak ba”in kubra.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya, Qs An-Nisa/35 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 84.

<sup>94</sup> Ibnu Rusyd, Bida yatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),h. 625.

<sup>95</sup> Ahmad Rafiq, *Op. Cit*, h. 273-274.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari pernikahan.
- b. Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad).
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama.
- d. Istri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan istri.
- e. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- f. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad perkawinan (taqliq talak)

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan-alasan perceraian itu adalah:

- a. Suami tidak memberi nafkah.
- b. Suami berbuat aniaya terhadap istri.
- c. Suami ghaib (berjauhan).
- d. Suami dihukum penjara<sup>96</sup>

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 275

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Adapaun Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1a, Kemudian mengacu pada efektivitas mediasi secara kuantitatif, efektivitas berfokus pada hasilnya, apabila tujuan yang diharapkan memenuhi target maka dapat dikatakan efektif, begitupun sebaliknya. Dari data yang ada pada dapat dilihat perkara yang masuk di Pengadilan Agama pekanbaru, perkara yang dimediasi pada tahun 2020 adalah sebesar 364, yang berhasil damai 5 perkara. Pada tahun 2021 hingga bulan Juni terdapat 170 perkara dan pada yang berhasil damai 9 perkara. Angka persentasi keberhasilannya bisa dikatakan sangat kecil, ini menunjukkan bahwa mediator belum mempunyai efek yang signifikan untuk mengurai angka perceraian.

Adapun yang menjadi faktor pendukung keberhasilan mediator non hakim bersertifikat dalam memediasi para pihak yang berperkara di pengadilan agama pekanbaru adalah :

- a. Adanya itikad baik dari para pihak dan adanya sikap yang kooperatif dari para pihak yang memang mempunyai keinginan untuk berdamai.
- b. Adanya bantuan dari pihak keluarga dekat yang bisa mengarahkan agar terciptanya perdamaian.
- c. Adanya tempat untuk mediasi yang nyaman dan kondusif.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Adanya mediator non hakim dengan kemampuan, keahlian dan kepaiawaianya dalam menyelesaikan masalah.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah:

- a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan tidak ada niatan untuk berdamai, para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi.
- b. Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit, konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit.
- c. Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketaanya melalui mediasi.
- d. Para pihak sering menunjukkan iktikad tidak baik dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan ada salah satu pihak yang tidak menghadiri mediasi dengan berbagai alasan dan diwakilkan kepada kuasa hukumnya.

**B. Saran**

1. Untuk para meditor non hakim yang bersertifikat, kiranya bisa lebih memaksimalkan waktu maupun kemampuan untuk dapat mendamaikan, meskipun tidak bisa menghalangi perceraian, tapi bisa membuat para pihak tidak bermusuhan.
2. Untuk masyarakat tidak menganggap bahwa Pengadilan hanya tempat perceraian.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al Bayan, 1994.
- Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau*, Pekanbaru, t.p., 1995.
- Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se Wilayah Riau*, Pekanbaru. T.p., 1995.
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011).
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Abu Daud di dalam Sunan Abi Dawud, *Kitab an-Nikah Bab fi Karahiyati ath-Thalaq*, jilid II, H.261, hadist nomor 2178.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalamMemajukan Sistem Peradilan*.
- Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010.

Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4, Pasal 116, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012. Asa, *Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta: Serial Media Dakwah, 1989.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif*, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia* ( Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu ), ( Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, ( Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011.

Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, Jakarta : KENCANA, 2013.

Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dalam reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2013.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Edisi Baru) Cet. VI;Jakarta:Media Pustaka Phoenix, 2012.

Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbirtase Syari'ah DiIndonesia*, h.28- 29.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Gery Seftia Fullendra. Penulis lahir di kota Duri, 17 januari 1997. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda tercinta Anasriful dan Ibunda tersayang Lendrawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 09 Duri barat pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Kecamatan Mandau. Dan pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Mandau. Kab.Bengkalis, ditahun yang sama penulis diterima pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri.

Pada Februari sampai Maret 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama (KUA), dan bulan Juli sampai Agustus 2019 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balai Makam Kecamatan Batin Solapan. Lulus menjadi Sarjana Hukum pada Senin 8 November 2021 di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU